

**UPAYA NON PENAL TERHADAP PENYAMPAIAN PENDAPAT  
DI MUKA UMUM YANG BERPONTESI ANARKIS  
(Study Kasus Pada Polresta Pontianak)**

**Oleh :**

**Saiful Alam,SH**

**Abstract**

Behavior protesters in Pontianak City Police jurisdiction (City of Pontianak and Kubu Raya district) there has been an anarchist and there are not anarchists. With the non-penal remedies Pontianak city police chief and his staff in the delivery of public opinion can be handled professionally and proportionately.

**Key words: Behavior protesters, Anarchists and Anarchist Something's Not**

**Abstrak**

Perilaku pengunjuk rasa di wilayah hukum Polresta Pontianak Kota (Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya) selama ini ada yang anarkis dan ada yang tidak anarkis. Dengan adanya upaya hukum non penal Kapolresta Pontianak kota dan jajarannya maka penyampaian pendapat di muka umum dapat diatasi secara profesional dan proporsional.

**Kata Kunci : Perilaku Pengunjuk Rasa, Anarkis Dan Ada Yang Tidak Anarkis**

**Pendahuluan**

Fungsi hukum adalah untuk mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya dan hubungan antara manusia dan negara agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Oleh karena itu, tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan didalam masyarakat.

Kepastian hukum menghendaki adanya perumusan kaedah-kaedah dalam peraturan perundang-undangan itu harus dilaksanakan dengan tegas. Secara tradisional ada yang memusatkan tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan dan ketertiban. Kalau dikaji lebih dalam, pada tingkat tertentu dua tujuan itu tidak selalu seiring bahkan dapat bertentangan satu sama lain. Tujuan mewujudkan keadilan berbeda dengan tujuan mewujudkan ketertiban.

Dalam keadaan tertentu, tuntutan keadilan akan melonggarkan kepastian hukum, sedangkan kepastian hukum justru merupakan komponen utama mewujudkan ketertiban. Tanpa kepastian hukum tidak akan ada ketertiban. Kebebasan mengeluarkan pendapat dimuka umum di dalam konstitusi Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 pasca Amandemen kedua telah diatur dalam pasal 28E ayat (3) yang menyatakan Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Disini maksud setiap orang berhak atas kebebasan mengeluarkan pendapat dapat berbentuk ungkapan atau pernyataan dimuka umum atau dalam bentuk tulisan ataupun juga dapat berbentuk sebuah aksi unjuk rasa atau demonstrasi. Unjuk rasa atau demonstrasi dalam kenyataannya dirasa sering menimbulkan permasalahan dalam tingkatan pelaksanaan, meskipun telah dijamin dalam konstitusi yang telah disepakati bersama dan hal ini sangat melukai semangat demokrasi yang rakyat Indonesia inginkan.

Demonstrasi adalah tindakan untuk menyampaikan penolakan, kritik, ketidakberpihakan, menyuarakan hal-hal yang dianggap sebuah penyimpangan. Maka dalam hal ini, sebenarnya secara bahasa demonstrasi tidak sesempit, melakukan *long-march*, berteriak-teriak, membakar ban, aksi teatrikal, merusak pagar, atau tindakan-tindakan yang selama ini melekat pada kata demonstrasi. Seharusnya demonstrasi juga “mendemonstrasikan” apa yang seharusnya dilakukan oleh pihak yang menjadi objek protes.

Demonstrasi yang marak akhir-akhir ini sering disertai dengan tindakan yang tidak bertanggungjawab yaitu dengan melakukan pengrusakan fasilitas umum, yang tentunya bertentangan dengan tujuan dari unjuk rasa atau demonstrasi itu sendiri. Aksi unjuk rasa seringkali berubah menjadi aksi yang anarkis dan melanggar tata tertib sosial yang telah terbangun dalam masyarakat.

Sehubungan dengan kejadian tersebut pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Meskipun tidak menyentuh secara lengkap tatacara serta pelaksanaan dari unjuk rasa itu sendiri namun Undang-undang ini memberikan sedikit harapan agar dikemudian hari aksi unjuk rasa tidak selalu diwarnai dengan anarkis/ kerusuhan. Dalam Undang-undang tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 yang dimaksudkan dengan Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di muka umum adalah dihadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan atau dilihat setiap orang. Unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.

Adapun tujuan pengaturan mengenai kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum ini seperti yang dinyatakan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,
- b. Mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat,
- c. Mewujudkan iklim yang kondusif bagi perkembangannya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi, dan menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.

Dari pola demonstrasi tersebut, kesemuanya berhubungan keamanan dan ketertiban Negara ini sehingga menjadi tugas tanggung jawab pemerintah dalam menjaganya dimana institusi yang diamanatkan dalam UUD 1945 adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adalah tugas dan kewajiban aparat pemerintah yang dalam hal ini pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melindungi hak asasi manusia; menghargai asas legalitas; menghargai prinsip praduga tak bersalah; dan menyelenggarakan pengamanan penyampaian pendapat di muka umum. (Pasal 7 UU No. 9 Tahun 1998) dan pelaksanaan tugasnya Polri berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13 yakni : “selaku pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakan hukum; memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Pelaksanaan demonstrasi ini tidak hanya terfokus di daerah tertentu saja namun sudah membahana diseluruh wilayah Indonesia dan untuk melaksanakan tugas pengamanan dan Agar dalam pelaksanaan tugasnya berjalan secara efektif dan efisien, maka Kepolisian Negara Republik Indonesia membagi wilayah republik ini menjadi wilayah hukum sebagaimana tertuang dalam pasal 6 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2002 yakni “dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian, wilayah Negara republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara republik Indonesia”. Dengan demikian Polri mempunyai wilayah hukum seluruh negeri mulai dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki area hukum mencakup seluruh wilayah yang ada di Negara Indonesia ini, Kepolisian Daerah yang dalam hal ini biasa disebut POLDA yang area hukumnya satu propinsi di Indonesia, Kepolisian kota yang biasa disebut dengan POLRESTA dengan area hukumnya daerah perkotaan yang ada di propinsi, selanjutnya ada Kepolisian Resor yang biasa disebut POLRES dengan area hukumnya di wilayah satu kabupaten, dan yang terakhir adalah Kepolisian Sektor yang biasa disebut POLSEK yang memiliki wilayah hukum satu kecamatan.

Tugas pokok Kepolisian sesuai dengan Pasal 13 UU Nomor 2 tahun 2002, bila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dijelaskan bahwa polisi berkewajiban untuk

melayani aksi tersebut dengan tindakan pengawalan dan sebelum para demonstran melaksanakan aksi penyampaian aspirasi adalah berkewajiban untuk memberitahu sebelumnya kepada pihak berwajib yang dalam hal ini Polri setempat kaitan rangkaian kegiatan demo, tempat berkumpul awal, jumlah pendemo, siapa pengkoordinir para pendemo, sarana dan prasarana dalam mendukung aksi tersebut, sasaran tempat tujuan, termasuk juga bila diperlukan melaporkan siapa saja yang akan memberikan materi dalam unjuk rasa tersebut.

Hal ini diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, antara lain sebagai berikut : Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri, Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh yang bersangkutan, pemimpin atau penanggung jawab kelompok, Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selambat-lambatnya 3X24 (tiga kali dua puluh empat jam) jam sebelum kegiatan dimulai telah diterima oleh Polri setempat, Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi kegiatan ilmiah didalam kampus dan kegiatan keagamaan. Untuk selanjutnya dari pihak kepolisian mengeluarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) yang berkaitan dengan aksi penyampaian pendapat di muka umum tersebut.

Kepolisian Resor Pontianak Kota merupakan satuan kewilayahan Polri yang memiliki wilayah hukum Kota Pontianak dan memiliki 11 (Sebelas) Kepolisian Sektor yakni Sektor Utara, Sektor Barat, Sektor Timur, Sektor Selatan, Sektor Ambawang, Sektor Mandor, Sektor Rasau, Sektor Bandara Udara, Sektor Pelabuhan Laut, Sektor Kota dan Sektor Kubu Raya. Kedudukan Polresta Pontianak Kota di ibu kota Kalimantan Barat dilihat dari aspek hukum untuk tingkat kejahatan maupun pelanggaran hukum masyarakat masih tinggi wilayah kota Pontianak dibanding wilayah, khususnya mengenai aksi penyampaian pendapat di muka umum cukup tinggi.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Polresta Pontianak Kota dalam memberikan pelayanan yang humanis terhadap kaum demonstran/ pengunjuk rasa sehingga mereka benar-benar terlindungi dalam aksi penyampaian pendapatnya di muka umum baik aksi tersebut disampaikan/ diberitahu dulu kepada pihak Polresta Pontianak Kota ataupun tidak. Hal ini dilakukan semata-mata demi terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat semata dengan pendelegasian diskresi tindakan kepolisian dengan penganalisaan secara matang.

Di wilayah hukum Polresta Pontianak Kota bahwa dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, ada aturan yang mengikat mulai dari hak pendemo, kewajiban pendemo, hak masyarakat umum selain pendemo, kewajiban aparat penegak hukum

memberikan perlindungan hukum dan lain sebagainya, namun dalam pelaksanaan sebenarnya tidak semua aturan di taati dan dipatuhi bersama oleh masyarakat penyampai pendapat dimuka umum. Hal ini bisa dilakukan dengan tidak disengaja akibat ketidaktahuannya karena mereka tinggal didaerah yang terisolasi dan belum masuk pengetahuan hukum tentang penyampaian pendapat di muka umum atau alasan lainnya maupun alasan yang disengaja dengan alasan tertentu sehingga bila kita benar-benar melakukan penegakan aturan maka akan semakin banyak kerugian yang dialami oleh berbagai pihak mengingat akan ada dampak akibat dari penegakan hukum tersebut. Kerugian terkecil diantaranya terjadi benturan antara Polri dengan pengunjuk rasa hingga kerugian besar yaitu tersumbatnya penyampaian aspirasi penyampaian pendapat dan mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat pada umumnya.

Dalam Pelaksanaan pelayanan terhadap aksi unjuk rasa yang difokuskan di wilayah hukum Polresta Pontianak Kota, seluruh satuan fungsi Kepolisian yang ada di Polresta Pontianak Kota beserta jajaran Polsek ikut dilibatkan didalam pelaksanaan pengamanannya namun penggunaan kekuatan polsek di lihat dari peserta demonstrasi berasal dan lokasi penyampaian pendapat di muka umum, analisa dengan memperhitungkan kekuatan para pendemonstran dan sisa anggota yang ada di mako dipersiapkan untuk meng *back up* mereka yang melaksanakan pengamanan (*standby on call*) bilamana perlu penambahan personil.

Disini perlu manajemen dalam pengaturannya yang dalam hal ini dikendalikan oleh Kabag Ops Polresta Pontianak Kota dengan petunjuk dan sepengetahuan Kapolresta selaku pimpinan tertinggi di Polresta Pontianak Kota.

Dalam situasi ini, Kapolresta Pontianak Kota selalu mencermati setiap pemberitahuan ataupun informasi pelaksanaan aksi oleh sekelompok pengunjuk rasa dan selalu mengumpulkan pimpinan satuan Polresta Pontianak Kota serta pimpinan Polri wilayah setingkat kecamatan (Kapolsek) untuk membicarakan penanganan aksi unjuk rasa sehingga aksi tersebut akan berjalan dengan lancar, aman, tertib, tidak mengganggu kepentingan masyarakat lain yang menjalankan aktifitasnya di luar kegiatan unjuk rasa dan tidak terjadi benturan antara pengunjuk rasa dengan petugas yang mengamankan aksi tersebut serta mengantarkan para demonstran kembali pulang secara selamat ke tempat titik kumpul awal aksi tersebut yang tentunya dengan kawalan unit ranmor lantas maupun unit patrol samapta Polresta Pontianak Kota. Penanganan yang selalu diterapkan adalah pengedepanan fungsi hukum Non Penal dengan barometer terukur berdasar eskalasi dan de-eskalasi pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum.

## **Permasalahan**

Bagaimana Upaya Penegakan Hukum Non Penal Terhadap Penyampaian Pendapat di Muka Umum yang Berpotensi Anarkis ?

## **Pembahasan**

Perkembangan perubahan dinamika sosial masyarakat dalam segala aspek kehidupan yang berdampak terhadap keamanan dalam negeri berlangsung dengan cepat, perkembangan tersebut sangat mempengaruhi meningkatnya berbagai kejahatan baik kejahatan konvensional, transnasional, kejahatan terhadap kekayaan Negara dan kejahatan yang berdampak kontijensi. Polresta Pontianak Kota merupakan sentra pelayanan dalam rangka pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Pontianak Kota melalui implementasi strategi peningkatan kualitas pelayanan dalam mendukung Revitalisasi Polri menuju Pelayanan prima guna meningkatkan kepercayaan masyarakat Kota Pontianak secara proaktif, transparan dan akuntabel, termasuk di dalamnya memberikan pelayanan kepada masyarakat yang akan menyampaikan pendapatnya di muka umum.

Polisi sipil dikatakan sebagai "polisi dari rakyat untuk rakyat". Kedekatan dengan rakyat, menjadi ciri penting polisi sipil. Di manapun di dunia, polisi digolongkan sebagai kekuatan para militer. Ini membuatnya harus bekerja keras untuk bisa "*moving away from military configuration*". Polisi sipil lebih diwakili oleh "pelayanan" (*Service*) daripada kekuatan (*Force*). Banyak hal yang harus menjalani dekonstruksi sebelum sampai kepada pelayanan, termasuk pengubahan mental dan karakteristik anggota Polri Polresta Pontianak Kota.

Dalam masyarakat modern, dinamika kehidupan berjalan sangat kompleks dengan tingkat persaingan yang tinggi memperebutkan sumber-sumber ekonomi dan produksi. Akibatnya untuk dapat bertahan hidup dituntut adanya produktivitas dan kreativitas.

Bagi yang tidak dapat melakukannya akan menjadi beban bagi orang lain dan berpotensi menimbulkan berbagai masalah sosial yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di masyarakat. Visi Polri saat ini bukan sekadar sebagai aparat penegak hukum, tapi sebagai polisi yang mampu menjadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, yang selalu dekat dan bersama-sama masyarakat; penegak hukum yang profesional dan proporsional serta menjunjung tinggi supremasi hukum dan HAM; pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat untuk mewujudkan keamanan dalam negeri dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera, sehingga pembangunan Polri diarahkan menuju polisi sipil (*Civilian Police*).

Salah satu faktor penting bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya adalah adanya rasa aman dalam melaksanakan kegiatan atau aktivitasnya. Masalah keamanan inilah yang menjadi tugas dan tanggung jawab utama petugas kepolisian dalam masyarakat. Polisi tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tapi berfungsi juga sebagai pelayan, pelindung dan pengayom masyarakat. Yaitu untuk melindungi harkat dan martabat manusia, memelihara ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan baik dalam bentuk tindakan terhadap pelaku kejahatan maupun dalam bentuk upaya pencegahan kejahatan dengan tujuan warga masyarakat dapat hidup dan bekerja maupun melaksanakan aktivitasnya dalam keadaan aman dan tentram. Dengan prinsip tersebut diatas masyarakat mengharapkan adanya polisi yang cocok dengan masyarakatnya, yang berubah dari polisi yang antagonis menjadi polisi yang protagonis.

#### 1. Situasi Penyampaian Pendapat di Muka Umum

Penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.

Situasi wilayah Kota Pontianak pada umumnya dalam keadaan aman dan kondusif, aktivitas masyarakat sehari-hari dapat berjalan dengan aman dan lancar. Perkembangan situasi dalam kehidupan bermasyarakat akan mengalami peningkatan seiring dengan adanya aktifitas tertentu yang menjadi perhatian masyarakat seperti kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dengan melakukan aksi unjuk rasa dari suatu kelompok atau elemen tertentu yang terjadi di wilayah hukum Polresta Pontianak Kota tahun 2009 – 2010.

Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat dan Persatuan Rakyat Kalimantan Barat (PRKB), sebagai salah satu organisasi masyarakat yang berada di Pontianak Kota beserta masyarakat sekitar akan melaksanakan aksi unjuk rasa pada waktu, tempat dan serta maksud sesuai dengan surat pemberitahuan yang telah disampaikan kepada Pihak Polresta Pontianak Kota.

Dengan adanya aksi unjuk rasa, maka hal tersebut tidak menutup kemungkinan pada saat pelaksanaan kegiatan tersebut di Kota Madya akan munculnya upaya-upaya oleh kelompok maupun perorangan yang akan memanfaatkan momentum tersebut dengan menimbulkan gangguan kamtibmas sehingga mengakibatkan kegiatan tersebut tidak dapat terlaksana dengan baik dan lancar sehingga menimbulkan gangguan kamtibmas yang dapat mengakibatkan jatuhnya korban jiwa maupun materiil.

Selain gangguan kamtibmas yang dapat terjadi, dengan adanya pelaksanaan kegiatan aksi unjuk rasa tersebut maka arus lalu lintas pada lokasi / ruas jalan menuju ketempat-tempat

yang digunakan untuk kegiatan, misalnya jalan raya di Kota Pontianak akan mengalami kemacetan sehingga selama kegiatan berlangsung guna mengantisipasi kemacetan arus lalu lintas yang panjang baik terhadap angkutan umum maupun kendaraan pribadi maka selama kegiatan berlangsung arus lalu lintas diarahkan ke jalur lain sehingga tidak mengganggu kamtibmas lintas.

Sesuai Renpam Unras No.:03/I/2010/Polresta Pontianak bahwa mekanisme pengamanan pelaksanaan unjuk rasa dengan pengedeapan fungsi pelayanan yang baik, prima, tepat sasaran untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Pontianak Kota khususnya masyarakat kota serta tegaknya hukum maka dilaksanakan dengan cara pengamanan terbuka (300 personel) diperbanyak (Polisi yang memakai seragam, atribut lengkap, dilengkapi tongkat, tameng, tali, kendaraan dinas, megaphone dll ) dan metodenya yaitu bersikap bersahabat (ramah, humanis, lugas dan tegas) dengan pendemo dan pengamanan tertutup yang berjumlah 10 orang (anggota Intel untuk mencari baket lengkap dan anggota Reskrim sebagai tim identifikasi/ pemotretan).

Kapolresta Pontianak Kota melakukan cipta kondisi untuk pencapaian aman dan tertib sebelum pelaksanaan Unras, menggalang massa setempat untuk tidak panik/ kaget serta tetap bekerja biasa bila ada Unras tersebut, bersikap bersahabat dengan massa pendemo, berusaha mengurangi massa pendemo, bekerja sama dengan Pemkot dengan menyampaikan info tersebut dan meminta para pejabat Pemkot untuk nantinya menemui pendemo, anggota Reskrim mengidentifikasi titik kumpul massa, pimpinan Unras (difoto), anggota berseragam yang masuk dalam Springas mempersiapkan perlengkapan pribadi, satuan dan mental yang baik. Setelah semua didapat disampaikan ke Kapolresta, yang selanjutnya Kapolresta mengajak perwiranya, Brimob cadangan back up, untuk rapat dengan bahasan hasil awal yang didapat dan cara tepat, efektif menghadapi Unras tersebut.

Pelaksanaan hari H, 3 jam sebelumnya anggota Intel memonitor situasi wilayah, lokasi titik temu massa, lokasi pendaratan speed boat, terminal darat untuk memonitor massa yang menghadiri Unras tersebut, setiap 15 menit anggota tersebut laporan ke Kasat Intel untuk diteruskan ke Kabag Ops via SMS, anggota Reskrim sterilisasi rute yang akan dilalui, lokasi Unras dan diidentifikasi untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan/ melanggar hukum, Kabag Ops melalui Kasat Samapta mempersiapkan personel dan peralatan yang akan dipakai untuk menghadapi Unras, Kasat Lintas mempersiapkan anggotanya untuk mengawal rute awal hingga lokasi tujuan serta kembalinya massa Unras, mengadakan pelayanan lainnya (Sim keliling).



Dari lokasi pul massa keberangkatan di kawal anggota Lantas dan ditutup anggota Patroli Samapta, saat dilokasi tujuan Unras, anggota pelayanan masyarakat, tim negoisator beserta Dalmas awal menyambul kedatangan pendemo dengan persahabatan (senyum, perkenalan, salam), Dalmas lanjutan standby di lokasi memantau dalmas awal dan massa unras, anggt patrol melanjutnya patrol wilayah sekitar tuk memonitor situasi luar lokasi Unras, penyampain materi dipersilahkan, tim negoisator menemui pimpinan Unras (damai, patuh hukum dalam aksinya, aspirasinya didengar orang yang tepat dan tertuju langsung), menyampaikan hasil pertemuannya ke Kabag Ops, kemudian Kabag Ops melaporkannya ke Kapolresta dan menemui pejabat Pemkot atau Pemprov, pejabat Pemda/Pemkot keluar dengan kawalan anggota menemui pengunjung rasa, pertemuan damai kedua belah pihak, pembuatan kesepakatan kedua belah pihak, pulang dalam kawalan anggota Polresta Pontianak dan situasi aman dan tertib.

## **Penutup**

1. Perilaku pengunjung rasa di wilayah hukum Polresta Pontianak Kota (Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya) selama ini ada yang anarkis dan ada yang tidak anarkis. Dengan adanya upaya hukum non penal Kapolresta Pontianak kota dan jajarannya maka penyampaian pendapat di muka umum dapat diatasi secara profesional dan proporsional.
2. Penegakan hukum dengan mengedepankan fungsi hukum sebagai fasilitator yang dikembangkan oleh Polresta Pontianak Kota dengan mengarahkan, merencanakan, mengendalikan dan mengkoordinasikan secara baik dalam pengelolaan penyampaian pendapat di muka umum dengan bekerja sama dan melibatkan tokoh masyarakat, koordinasi antar instansi terkait, serta menjalankan penyesuaian atau negosiasi dengan tokoh dan penanggung jawab pengunjung rasa baik yang memberitahukan aksinya ataupun tidak kepada pihak aparat penegak hukum lebih efektif dan menjadikan aksi penyampaian pendapat di muka umum tepat sasaran hingga agretifitas tindakan yang menimbulkan kerugian jiwa, harta benda dan psikologi tidak terjadi dalam penyampaian pendapat dan tercipta Harkamtibmas di wilayah tersebut.
3. Dengan melihat fakta dan data berdasarkan hasil penelitian, bahwasanya jumlah masyarakat yang menyampaikan pendapat di muka umum (unjuk rasa) akan mempengaruhi kondisi yang akan terjadi.

## **Daftar Pustaka**

Ahmad, Ali, 1998, Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum, PT Yasrif Watampone,

- IKAPI, Jakarta.
- , 2002, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Cet. Kedua, PT Gunung Agung, Tbk. Jakarta.
- Benny K. Harman, 1997. *Konfigurasi Politik dan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Jakarta, Eisa, hal. 318.
- Chamelin/FoxlWhisenand, 1975. *Introduction to Criminal Justice*. New Jersey, Prentice Hall, , hal. 240.
- Djamin, Awaloedin. *Administrasi Kepolisian RI*. Bandung: Sanyata Sumanasa Wira, 1995.
- Edgar, 1992. *Bodenheimer, Jurisprudence, The Philosophy and Method of The Law*, Massachusets, Harvard University Press, hal. 200.
- Finlay Mark, Zveki Uglesa, *Alternatif Kegiatan Polisi Masyarakat Tinjauan Lintas Budaya*, Jakarta: PT Cipta Manunggal, 1998.
- Goldstein, Herman “ Mengendalikan dan Mengkaji Kontak Polisi Penduduk ”. dalam *Police Deviance* (Penyimpangan Polisi). Editor, Thomas Barker dan David L. Carter. Penyadur. Kunarto. Jakarta : Cipta Manunggal, 1999.
- Kelana, Momo. *Memahami Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002, Latar Belakang dan Komentar Pasal Demi Pasal*. Jakarta: PTIK Press, 2002
- Meliala. Adrianus, *Mengkritisi Polisi*. Yogyakarta: Kanisius, 2001.
- Moh. Mahfud MD., 1999. *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta, Gama Media, , hal. 284.
- R. Abdussalam, 2003. *Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum*, Jakarta: PTIK.
- Rahman, Fitriana Sidikah. “ Negoisasi dalam Pengendalian Unjuk Rasa oleh Tim Negoisator Polda Metro Jaya ”. Sebuah Tesis dalam rangka mencapai Gelar Magister Sains, Jakarta, 2003.
- Santoso Thomas. *Teori-Teori Kekerasan*. Jakarta : Ghalia Indonesia dan Universitas Kristen Petra, 2002.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. *Psikologi Sosial*. Jakarta. Balai Pustaka, 1996.
- Sekjen DPR RI, 1996. *Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum*, Jakarta, Maret, hal. 40.
- Sekjen DPR RI, 1999. *Proses Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum*, Jakarta Maret, hal. 38-39.
- Skolnick J, Fyfe J.J. *Brutalis Polisi, Penggunaan Kekerasan yang Berlebihan*, Jakarta: PT Cipta Manunggal, 2001.

Strauss, Alsem dan Juliet Corbin. Dasar-dasar Penelitian Kualitatif, tata langkah dan teknik-teknik teoritisasi data. Kamdani (penyuting), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta, 2005.

Suparlan, Supardi. “ Diklat Metodologi Penelitian Kualitatif.’ Jakarta: Program Kajian Wilayah Amerika Program Pasca Sarjana.

------. “ Mengefektifkan Fungsi dan Peranan Polri dalam Penanggulangan Tindak Kekerasan dan Amuk Massa: Dalam Perspektif Anthropologi “. Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia. Editor. Parsudi Suparlan. Jakarta. YPKIK. 2004.

------. “ Mengefektifkan Fungsi dan Peranan Polri dalam Penanggulangan Tindak Kekerasan dan Amuk Massa: Dalam Perspektif Anthropologi “. Makalah saresehan. Jakarta. Program Pasca Sarjana KIK-UI, 2000.

------. “ Polisi dan Fungsinya dalam Masyarakat” Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia. Editor. Parsudi Suparlan. Jakarta: YPKIK, 2004.

Tim ICCE UIN Jakarta. Demokrasi, Hak Azasi Manusia dan masyarakat Madani. Jakarta. Prenada Media, 2003.